

**Judul** : Anggaran pendidikan untuk swasta kecil, PTS layak mendapat bantuan operasional  
**Tanggal** : Kamis, 28 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Anggaran Pendidikan Untuk Swasta Kecil

# PTS Layak Mendapat Bantuan Operasional

Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengusulkan adanya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS). Hal ini penting mengingat anggaran bantuan untuk PTS masih sangat kecil, hanya Rp 300 miliar untuk lebih dari dua ribu perguruan tinggi.

PADAHAL, kontribusi PTS terhadap penyerapan mahasiswa cukup signifikan, sehingga anggaran yang ada dianggap tidak seimbang.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada perbedaan antara perguruan tinggi swasta dan negeri, konstitusi negara menyatakan keduanya setara," ujar Sofyan dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, Pemerintah masih memberikan perlakuan yang tidak adil antara PTN dan PTS. Pada 2026, biaya operasional PTN dianggarkan Rp 5,8 triliun untuk 120 PTN, ditambah revitalisasi Rp 533 miliar dan sarana prasarana Rp 2,3 triliun. Sedangkan PTS hanya mendapat Rp 300 miliar.

Legislator PDIP asal Dapil Sumatera Utara I itu menambahkan, banyak PTS berkomitmen memberikan layanan pendidikan tinggi terjangkau dan menyebar ke pelosok negeri. Sebaliknya, mayoritas PTN hanya berada di kota besar.

Untuk itu, dia mengusulkan BOPTS, mirip dana BOS untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Bahkan, dana BOS untuk siswa SMA cukup besar, mencapai Rp 1,8 juta per siswa. Sementara BOPTN yang sebesar Rp 5,8 triliun bisa menjangkau 5.400.058 mahasiswa.

"Kalau mau diperjuangkan, PTS bisa dapat Rp 1 juta per mahasiswa pun nggak apa-apa, sebaiknya sama dengan BOPTN yang saat ini sekitar Rp 1,2 juta. Dengan begitu, tercipta rasa keadilan," katanya.

Senada, anggota Komisi X



Sofyan Tan

DPR Furtasan Ali Yusuf menilai, alokasi anggaran yang dibuat belum berpihak kepada PTS. Padahal, Kemdiktisaintek sudah merancang penambahan anggaran untuk meningkatkan keseimbangan.

"Tapi anggarannya masih belum mencerminkan kesetaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta," ucap Furtasan.

Tak cuma soal anggaran, Fur-

tasannya juga menyoroti ketidakberpihakan kepada PTS yang terus "dilangkahi" oleh PTN. Salah satu yang utama terkait Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Hingga akhir bulan ini, penerimaan mahasiswa baru di PTS belum beranjak naik.

"Bahkan di beberapa daerah turun 40-50 persen," ungkapnya. Dia menyebut, hal ini terjadi karena kebijakan SNPMB tidak dipatuhi PTN. Masih ada PTN yang menerima mahasiswa baru setelah bulan Juli, padahal PTS berharap dapat menerima mahasiswa setelah SNPMB PTN usai.

"Tapi karena kebijakan tidak dijalankan, PTS nggak kebagian 'kue' juga," tutur politikus Partai NasDem itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, PTS memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan di wilayah yang belum terjangkau PTN. Karena itu, Pemerintah mestinya lebih memperhatikan nasib PTS dan keseimbangan pendidikan tinggi.

"Jangan sampai kebijakan

negara justru mematikan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang sudah berjuang di lapangan. Pemerintah harus hadir untuk menjaga keseimbangan ini," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto menegaskan, Pemerintah tidak pernah membedakan antara PTN dan PTS. Pihaknya menerima usulan BOPTS ini untuk meningkatkan kualitas PTS di Indonesia dan akan menindaklanjuti bersama pihak terkait.

Kemdiktisaintek, lanjutnya, akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Nanti bisa direalisasikan, seperti BOS untuk sekolah menengah dan dasar. Terima kasih ini masukannya," ucapnya.

Brian juga mengatakna, pihaknya mencoba meningkatkan jumlah BOPTS bila nantinya direalisasikan.

"Kita naikkan terus anggaran pembiayaan untuk PTS," tutupnya. ■ PYB